



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD DJAYA BAKRI
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN DAN KERJASAMA
3. NHK : 627933

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

4.685.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 291 m2/232 m2 di KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/91 m2 di KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 368 m2/179 m2 di KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah Seluas 1502 m2 di KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/27 m2 di KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 386 m2 di KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/80 m2 di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
8. Tanah Seluas 910 m2 di KOTA TARAKAN , LAINNYA Rp. 220.000.000
9. Tanah Seluas 176 m2 di KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
10. Tanah Seluas 2993 m2 di KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
11. Tanah Seluas 1236 m2 di KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	95.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	13.058.706
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.793.058.706
III. HUTANG	Rp.	324.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.469.058.706

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.